

**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
TENTANG PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR  
KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

*EVALUATION OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD  
STATEMENTS REGARDING THE PRESENTATION OF BUDGET REALIZATION REPORTS AT THE  
MALALAYANG SUB-DISTRICT OFFICE MANADO CITY*

Oleh:

**Widya Tamalawe Majampoh<sup>1</sup>  
Christian Datu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>[widyamajampoh@gmail.com](mailto:widyamajampoh@gmail.com)  
<sup>2</sup>[itho.cd@gmail.com](mailto:itho.cd@gmail.com)

**Abstrak:** Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan suatu standar, pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dimana dalam standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah no.71 Tahun 2010. Kecamatan Malalayang telah menyajikan salah satu unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan PSAP no. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado sudah atau belum sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Malalayang telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang telah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan. pos transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Kecamatan Malalayang tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer. Hal ini sudah sesuai dengan SAP tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja.

**Kata Kunci:** Evaluasi penerapan, psap no. 2, laporan realisasi anggaran

**Abstract:** Government accounting standard (SAP) is a standard, a guideline in compiling and presenting financial reports in the governments in order to achieve transparency and accountability. Where the government accounting standards are regulated in government regulation no.71 of 2010. Malalayang sub-district has presented one of the elements of the financial report, namely the budget realization report. The purpose of this study was to determine and evaluate the application of PSAP No.02 regarding the presentation of the budget realization report prepared by the malalayang sub-district office Manado city whether or not it was in accordance with government regulation no.71 of 2010 concerning government accounting standards. This research uses descriptive qualitative method. The results of the study show that the malalayang sub-district has used a computerized record called SIMDA. The presentation of the budget realization report for the malalayang sub-district has implemented the income, expenditure, surplus/deficit and remaining over/less budget financing in one reporting period. Post transfes, financing receipts, financing expenditures, and net financing are not applied because the malalayang sub-district does not have financing and transfer needs. This is in accordance with SAP regarding the contents of the budget realization report, because the Malalayang sub-district applies and account according to need only.

**Keywords:** Implementation evaluation, psap no 2, budget realization report

### Latar Belakang

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintahan yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran (Sundary, 2020). Laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antar eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi.

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif Negara Indonesia dibawah kabupaten/kota, sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Dalam hal satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, serta mempertanggungjawabkan atas kewenangan yang dilimpahkan dengan membuat laporan keuangan. Sehubungan dengan penerapan PSAP no. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri dari atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

Kecamatan Malalayang merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Manado, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya diharuskan untuk menyusun laporan realisasi anggaran yang merupakan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Malalayang Kota Manado telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi *software* yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), sistem pencatatan ini berbasis aktual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, Namun sebaliknya aplikasi SIMDA memiliki kendala atau kelemahan dimana untuk membuat suatu laporan keuangan hanya bisa diakses melalui PEMKOT (Pemerintah Kota), dikarenakan sistem tersebut masih bersifat offline. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado harus ke PEMKOT untuk mengakses aplikasi SIMDA, yang diharapkan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan dan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dan menunjukkan ketaatan Kantor Kecamatan Malalayang terhadap APBN/APBD.

Pada penelitian ini hanya mengambil Laporan Realisasi Anggaran saja dengan alasan, Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama, laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran, jika dibandingkan dengan Neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan Neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran yang ada di instansi Kecamatan Malalayang harus dilakukan evaluasi agar dapat memberi informasi yang penting untuk pengguna anggaran agar dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Sehingga dibutuhkan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengetahui kesesuaian dalam proses Penyajian Laporan Realisasi Anggaran agar Kinerja dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan lebih efektif dan efisien.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan PSAP no. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado sudah atau belum sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

### **Konsep Akuntansi**

Menurut Pujiyanti (2015:19) akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai akuntansi dapat disimpulkan suatu disiplin ilmu yang menyediakan suatu informasi berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Suwardjono (2015:10) akuntansi dapat didefinisikan sebagai yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Dari sudut pandang perekonomian pemerintahan sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik dibayarkan melalui pajak dan pendapatan Negara lainnya yang sudah diatur dalam Hukum. Sedangkan menurut Siregar (2015:2), akuntansi sektor publik yang mengelola dana masyarakat. Berkaitan dengan tugasnya mengelola dana dalam pengelolaan dana tersebut.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016:17) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, dalam suatu periode pelaporan.

### **Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana oleh peraturan perundang-undangan.

### **Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
4. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Struktur Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: (a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, (b) Cakupan entitas pelaporan (c) Periode yang dicakup (d) Mata uang pelaporan, (e) Satuan angka yang digunakan.

### Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA; (b) Belanja; (c) Transfer; (d) Surplus/defisit-LRA; (e) Penerimaan pembiayaan; (f) Pengeluaran pembiayaan; (g) Pembiayaan neto; dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

### Penelitian Terdahulu

Asmianti dan Walandouw (2015) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai atau belum, dengan PSAP No. 2 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 24 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten minahasa utaratelah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran. Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menyajikan LRA sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP.

Irawan (2016) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto), bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

Yuniarti (2019) melakukan hasil penelitian dengan judul Analisis Penerapan Psap Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah sesuai atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil dari penelitian menunjukkan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil atau ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Penerapan PSAP pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado yang berlokasi di jalan Mogandi kel. Malalayang Satu, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai dari bulan November tahun 2020 sampai dengan selesai.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara yang menguraikan informasi umum Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado seperti sejarah instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain:

#### 1. Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan data yang telah dikumpulkan peneliti yang digunakan untuk analisis, dan kemudian digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai yang berwenang memberikan keterangan yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) mengacu informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa profil lembaga, struktur organisasi, Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh melalui Kecamatan Malalayang.

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi atau data – data, dengan hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan Sekretaris Camat yaitu Bapak Yusuf D. Kopitoy, SH, MH dan Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan yaitu Ibu Aneke Mumu, S.E yang dapat memberikan informasi mengenai penyajian laporan realisasi anggaran.

#### 2. Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen pendukung lainnya yang terkait dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, untuk dievaluasi.

### Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Adapun data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Proses analisis yang akan digunakan adalah :

1. Tahap pertama, melakukan pengumpulan data mengenai laporan realisasi anggaran baik melalui wawancara maupun dokumentasi tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. Proses analisis data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bersama Ibu Aneke Mumu, S.E selaku Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan, dan Bapak Yusuf D. Kopitoy, SH, MH selaku Sekretaris Camat. Selain wawancara peneliti juga melakukan proses dokumentasi berupa dokumen pendukung yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Malalayang, Visi Dan Misi Kecamatan Malalayang, Sejarah Kecamatan Malalayang, Struktur Organisasi Kecamatan Malalayang serta Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Malalayang.
2. Tahap kedua, peneliti mengevaluasi data menggunakan metode kualitatif dimana peneliti mengolah data yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang laporan realisasi anggaran pada kantor kecamatan malalayang. peneliti membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian proses penyusunan laporan realisasi anggaran di Kantor Kecamatan Malalayang.
3. Tahap akhir, peneliti melakukan pengolahan data terkait penyajian realisasi anggaran pada kantor kecamatan malalayang kota manado dan peneliti pun menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada kecamatan malalayang kota manado mengenai peningkatan Kinerja dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja agar dapat lebih efektif dan efisien.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kecamatan Malalayang adalah salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Manado. Yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Manado, dengan wilayah kerja:

1. Kelurahan Malalayang Satu
2. Kelurahan Malalayang Satu Timur
3. Kelurahan Malalayang Satu Barat
4. Kelurahan Malalayang Dua
5. Kelurahan Bahu
6. Kelurahan Kleak
7. Kelurahan Batukota
8. Kelurahan Winangun Satu
9. Kelurahan Winangun Dua

Geografis/administrasi

Kantor Kecamatan Malalayang beralamat di Jalan Mogandi Kelurahan Malalayang Satu, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sario
- Sebelah Timur : Kecamatan Pineleng
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pineleng
- Sebelah Barat : Teluk Manado

Luas wilayah kecamatan malalayang yaitu seluas 3,029,75 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 15,849 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 53,549 orang.

**Nama Dan Bentuk Instansi**

Kantor Camat Malalayang merupakan Kantor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan.

**Visi dan Misi Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado****“MANADO KOTA CERDAS 2021”**

*“The Smart City Of Manado In 2021”*

1. Membangun Manado Kota **“Cendekia”** dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan tangguh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat
2. Membangun Manado sebagai destinasi **“Ekowisata”** berbasis konservasi lingkungan laut dan kepulauan
3. Membangun masyarakat Kota yang semakin **“Religius”** dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan toleransi
4. Membangun Kota yang memiliki **“Daya Saing”** dengan berorientasi pada peningkatan daya Tarik investasi serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
5. Mewujudkan Manado yang **“Aman dan Nyaman”** melalui peningkatan kualitas sistem keamanan dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan serta tertip ruang
6. Mewujudkan Manado Kota yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih **“Sehat Sejahtera”** dengan lingkungan kota yang bersih dan arsi

**Hasil Penelitian****Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah pada Kecamatan Malalayang**

Laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Kecamatan Malalayang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran dan juga dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun sebelumnya. Di dalam PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu. Begitupun dengan Kecamatan Malalayang juga menyajikan

Laporan Realisasi Anggaran selama satu tahun sekali. PSAP No. 02. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut, dapat dijelaskan pos-pos sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

Pada laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang, pendapatan yang disajikan dalam pos pendapatan adalah semua penerimaan oleh Kas Umum Negara/Daerah, dan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah. Jenis Pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pendapatan Retribusi Daerah.

#### 2. Belanja

Pada laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang, belanja yang disajikan dalam pos belanja merupakan semua pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah, dan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara/Daerah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa. Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung.

#### 3. Surplus/defisit

Pada laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang, telah disajikan pos Surplus/Defisit, yang merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja.

#### 4. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pada laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang, telah disajikan pos Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran.

### Pembahasan

**Tabel 1. Evaluasi Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kecamatan Malalayang Dengan PSAP No. 02 Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010**

Unsur	Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No 02 Tahun 2010	Laporan Realisasi Anggaran Pada Kecamatan Malalayang Kota Manado	Ket
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran kecamatan malalayang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit-LRA, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Sesuai
Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.	PSAP N0. 02 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan.	Laporan realisasi anggaran kecamatan malalayang harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan.	Sesuai
Periode pelaporan	PSAP No. 02 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Laporan realisasi anggaran kecamatan malalayang disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sesuai
Ketepatan waktu penyajian	PSAP N0. 02 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran kecamatan malalayang selambat lambatnya 6	Sesuai

		bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	
Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02 laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan realisasi anggaran kecamatan malalayang sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Surplus/defisit-LRA d. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sesuai
Penyelenggaraan akuntansi anggaran	PSAP No. 02 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.	Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.	Sesuai
<b>AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA</b>			
Pengakuan	PSAP No. 02 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.	Pengakuan pendapatan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kecamatan malalayang yaitu pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Sesuai
Pengukuran	PSAP No. 02 Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan	PSAP No. 02 Akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah	Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS	Sesuai
<b>AKUNTAN SI BELANJA</b>			
Pengakuan	PSAP No. 02 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	Dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kecamatan malalayang menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi	Sesuai



		perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.	
Pengukuran	PSAP No. 02 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran	Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan	PSAP No. 02 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. PSAP No. 02 Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga	Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah kecamatan malalayang yaitu belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan Gedung.	Sesuai
Penyajian belanja operasi	PSAP No. 02 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.	Belanja operasi diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sifat dari belanja operasi di Pemerintah kecamatan malalayang sifatnya memberikan manfaat jangka pendek.	Sesuai
Penyajian belanja modal	PSAP No. 02 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.	Belanja modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Pengklasifikasian belanja modal Pemerintah Kecamatan malalayang yaitu meliputi: a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Sesuai
<b>AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA</b>			
Penyajian surplus/defisit-LRA	PSAP No. 02 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA	Surplus/Defisit-LRA adalah selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.	Sesuai
<b>AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)</b>			
Penyajian SiLPA/SiKPA	PSAP No. 02 Selisih lebih/kurang realisasi PendapatanLRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.	Pemerintah Kecamatan malalayang mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Pada tabel 1 dapat dilihat pada bagian penyajian pos-pos laporan realisasi anggaran dimana pada PSAP no. 2 tentang laporan realisasi mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan; (b) Belanja; (c) Transfer; (d) Surplus/defisit; (e) Penerimaan Pembiayaan; (f) Pengeluaran Pembiayaan; (g) Pembiayaan Neto; (h) Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran

Pada Kecamatan Malalayang telah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan. pos transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Kecamatan Malalayang tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer. Hal ini sudah sesuai dengan SAP tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang penyajian laporan realisasi anggaran pada kecamatan malalayang kota manado, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kecamatan malalayang sudah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan telah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Pemerintah Kecamatan Malalayang telah menyajikan 4 komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu: Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPASiKPA). Meskipun ada beberapa komponen yang tidak ada dalam laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang yaitu: transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Kecamatan Malalayang tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer. Hal ini sudah sesuai dengan SAP tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja.
3. Setiap Pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kecamatan malalayang akan di catat dan terima oleh bendahara penerimaan yang uangnya langsung masuk di RKUD.

### Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Kecamatan Malalayang yaitu untuk Penyajian LRA Kecamatan Malalayang harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah supaya Laporan realisasi Anggarannya handal, kompeten, dan mempermudah para pengguna dalam memperoleh informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan serta mempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmianti, S, Walandouw. S.K (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 3, No. 1 Hal 418-425. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7121>. Diakses 22 April 2020.
- Hasanah, N, Fauzi, A (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit in Media, Jakarta.
- Irawan, M (2016). Penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN: 2337-5663. Volume: 4, Nomor: 2. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1374>. Diakses 22 April 2020.
- (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang *Laporan Realisasi Anggaran*.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Pujiyanti, Ferra. (2015). *Akuntansi Dasar*. Penerbit. Lembar Pustaka Indonesia. Tangerang.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.

Siregar, B (2015). *Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Stefani, I, D 2014. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Grobogan), *Skripsi Jurusan Ekonomi Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/32083>. Diakses 22 April 2020.

Sunday. P (2020). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27535>. Diakses 15 November 2020

Suwardjono (2015). *Teori Akuntansi: Perekayasa Laporan Keuangan*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

Utomo, R dan C Elbas 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, *Jurnal Fakultas Ekonomi*, ISSN : 2252-8768. Volume 05 Nomor 02. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/346>. Diakses 22 April 2020.

Yuniarti. A (2019). Analisis Penerapan Psap Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. (*Doctoral Dissertation*, IAIN Surakarta). <http://core.ac.uk/download/pdf/296479423.pdf>. Diakses 22 April 2020.